

## ABSTRAKSI

### **Tanggapan Pemerintah Jepang atas Kasus *Juugun Ianfu* di Indonesia, Studi Kasus 1992-2014**

Nindha Aditya Putri

*Juugun Ianfu* merupakan sebutan bagi perempuan yang dipaksa untuk menjadi pemenuh kebutuhan seksual tentara Jepang selama masa perang dunia II. *Juugun ianfu* direkrut secara paksa dari daerah-daerah jajahan Jepang seperti Korea, Cina, Filipina, Taiwan, dan Indonesia. Penggunaan *juugun ianfu* di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945. Keberadaan *juugun ianfu* Indonesia tersebar di seluruh pelosok Indonesia, seperti Jawa Barat, Kalimantan Timur, Pulau Buru, dan lain-lain. Perempuan yang direkrut untuk menjadi *juugun ianfu* berkisar pada usia 11-20 tahun. Setelah masa perang dan penjajahan Jepang usai, kasus *juugun ianfu* belum terkuak karena tidak ada saksi maupun mantan *juugun ianfu* yang berani mengungkapkannya. Hingga akhirnya pada tahun 1992, keberadaan *juugun ianfu* di Indonesia mulai terungkap saat seorang wartawan surat kabar harian *Suara Merdeka* mendapatkan informasi mengenai keberadaan *juugun ianfu* Indonesia, kemudian ia menceritakan hal tersebut pada seorang teolog Jepang bernama Koichi Kimura yang kemudian melakukan penelitian tentang *juugun ianfu* Indonesia. Pada akhirnya ia berhasil mewawancarai seorang mantan *juugun ianfu* Indonesia yang bernama Tuminah. Banyak masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa pemerintah Jepang tidak mau bertanggung jawab atas kasus *juugun ianfu*.

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana pemerintah Jepang menanggapi kasus *juugun ianfu* di Indonesia dengan mengaitkan data-data sejarah dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah Indonesia dan Jepang. Penelitian ini memiliki batasan waktu tahun 1992-2014. Tahun 1992 dipilih karena pada tahun tersebutlah mulai terungkapnya penggunaan *juugun ianfu* selama masa perang, sehingga pada akhirnya menjadi dasar pergerakan-pergerakan para mantan *juugun ianfu* untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang. Sedangkan tahun 2014 menjadi batas penelitian karena pada tahun tersebut banyak diperoleh data-data terbaru terkait perkembangan kasus *juugun ianfu*.

Untuk menganalisis permasalahan penelitian ini, digunakan Teori Pemerintahan C.F. Strong yang tercantum dalam buku *Modern Political Constitutions*. Kedua teori ini digunakan untuk mempertegas sifat-sifat pemerintahan yang dilakukan oleh kedua negara. Selain itu, digunakan pula

Pendekatan Politik Seks Kuntowijoyo untuk memahami isi dari penelitian ini. Pendekatan ini diperoleh dari sebuah buku karya Kuntowijoyo berjudul *Metodologi Sejarah*. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, dimana penelitian ini mengambil data primer yang berupa data-data laporan pemerintah dan data sekunder yang berupa buku, artikel, jurnal, dan majalah.

Dari berbagai data-data yang berhasil diperoleh dan dianalisis, dapat diketahui bahwa pemerintah Jepang telah melakukan berbagai hal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus *juugun ianfu*. Seperti melakukan permintaan maaf sebanyak empat kali dan pemberian dana bantuan untuk para mantan *juugun ianfu* melalui AWF (*Asian Women Fund*). Akan tetapi, tidak semua dari bentuk pertanggungjawaban tersebut yang dapat diterima dengan baik oleh para mantan *juugun ianfu* di Indonesia.

**Kata kunci: *Juugun ianfu*, Pemerintah Jepang, Pemerintah Indonesia.**

## ABSTRACT

### The Japanese's Government Response on the case of *Juguun Ianfu* in Indonesia, case study 1992 - 2014

Nindha Aditya Putri

*Juugun Ianfu* is a call for a woman who was forced to fulfill Japanese soldier's sexual needs during the Second World War. *Juugun Ianfus* were recruited forcefully from the colonized areas such as Korea, China, Philippine, Taiwan and Indonesia. The use of *Juugun ianfu* in Indonesia was started in 1942 and ended in 1945. The existence of Indonesian *juugun ianfus* was spread almost in all regions in Indonesia like West Java, East Borneo, Buru Island, etc. The recruited women were about 11-20 years old. When the Second World War and the Japanese colonization were over, the case of *Juugun Ianfu* was never talked. No people talked or discussed about the case anymore even almost no people knew about it. But in 1992, a journalist of *Suara Merdeka* newspaper got information of Indonesian *juugun ianfu* and he told this information to Japanese Theologian, Koichi Kimura who then did a research about *juugun ianfu* in Indonesia. Finally, he could find and interview Tuminah one of the *juugun ianfus* who was still alive. Most people in Indonesia thought that the Japanese Government did not want to be responsible on the case.

The research is discussing about how far the Japanese Government responded on the *Juugun Ianfu's* case in Indonesia based on the historical data from the both side, Indonesian and Japanese Government. The research is limited from 1992 – 2014. The year of 1992 is chosen since it was the year in which the case was started to be discussed and finally it became the reasons for the *Juugun Ianfu* retirees demanding Japanese Government's responsibility. The year of 2014 is chosen because in that year a lot of new information about *juugun ianfu* was found.

To analyze the case, C.F Strong's Government Theory from the *Modern Political Constitutions* books are used. Theories are used to confirm the government characters done by both side. Besides that, Kuntowijoyo's Sex Politic Approach is also used to understand the research. This approach is taken from a book written by Kuntowijoyo entitled *Metodologi Sejarah*. And the used method is the method of history research in which the writer takes some primary data in the form of government reports and secondary data such as books, articles, journals, and magazines is also used to do the research.

From the found and analyzed data, it can be known that actually Japanese Government has done many things as the realization of their responsibility on *Juugun Ianfu*'s case, as the example, Japanese government had asked for apologies four times and gave a lot fund as compensation through AWF (Asian Women Fund) to all of Indonesian *juugun ianfus*. However, not all of the responsibility can be distributed and accepted well by *Juugun Ianfu* retirees in Indonesia.

**Keyword:** *Juugun Ianfu*, Japanese Government, Indonesian Government

## 要旨

### インドネシアにおける「従軍慰安婦」問題に対する日本の歴代政権 (1992-2014) の対応に関する研究

ニンダ・アディティア・プトリ

「従軍慰安婦」は、日中戦争および太平洋戦争中、強制的に連行され、日本の軍人および軍属との性行為の相手をさせられた女性のことである。彼女らは日本の植民地、韓国、中国、フィリピン、台湾、インドネシアから強制連行された。従軍慰安婦はインドネシアで 1942 年からインドネシアが日本から独立する 1945 年まで主としてジャワ島、スマトラ島、ボルネオ島東岸部そしてスラウェシ島に多数点在した。強制連行されたのは 11 歳から 20 歳の女性を中心であった。日本による植民地政策から解放された後、元従軍慰安婦による従軍慰安婦問題に関する証言は長く残されないでいた。1992 年 *Suara Merdeka* 紙の記者がインドネシアにおける従軍慰安婦についての特集記事を発表した。この報道がきっかけとなって、神学者である木村公一が、記事に取り上げられたインドネシア従軍慰安婦とのインタビューをおこなった。しかし、インドネシア人が期待するような従軍慰安婦問題に対する賠償責任等は、日本政府によっておこなわれることはなかった。

本研究は 1992 年から 2014 年までの期間を対象とし、インドネシア政府と日本歴代政権の歴史の報告をもとに、従軍慰安婦問題に関する日本政府の対応を研究するものである。日本で朝日新聞紙上にて従軍慰安婦問題が大きく取り上げられた 1992 年を本研究の基点とし、2014 年後半に明らかになった従軍慰安婦問題の新しい展開までの期間を本研究の対象期間とした。

この問題を理論的に分析するため、*"Modern Political Constitutions"* (C.F. Strong) を参考に資料を収集した。また歴史的視点については、*Metodologi Sejarah* (Kuntowijoyo) を参考とした。その他、新聞・雑誌記事などを参照した。

研究の結果、日本の歴代政権の政治的解釈としては、インドネシアにおける従軍慰安婦に対して十分な補償をおこなったということがわかった。例えば、日本の歴代政権は十分に謝罪をし、AWF（女性のためのアジア平和国民基金）基金を設立したことなどである。しかし、インドネシア従

軍慰安婦にとって、この日本の歴代政権の対応が決して十分なものではないこともわかった。

キーワード：インドネシア人従軍慰安婦、日本の歴代政権、インドネシア政府